

**PENGARUH PELATIHAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI
GURU (PLPG) DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI
PROFESIONAL GURU DI SMA NEGERI 2 BANTAENG**



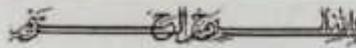
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar**

OLEH

**NASRUN ARSYAD
10543007214**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Nasrun Arsyad**, NIM 10543007214 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 063 Tahun 1440 H/2019 M pada tanggal 14 Sya'ban 1440 H / 19 April 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019.

18 Sya'ban 1440 H
 Makassar, 24 April 2019 M

Panitia Ujian

- | | | |
|------------------|--|---------|
| 1. Pengawas Umum | Prof. Dr. H. Abd-Rahman Rofiqi, S.E., MM | (.....) |
| 2. Ketua | Erwin Akib, M.Pd., Ph.D | (.....) |
| 3. Sekretaris | Dr. Bahuddin, M.Pd. | (.....) |
| 4. Pengaji | 1. Dr. A. Rohana, M. Ustaz | (.....) |
| | 2. Dr. Muhajir, M. Pd. | (.....) |
| | 3. Erwin Akib, M. Pd., Ph.D | (.....) |
| | 4. Dr. Andri Sugiati, M.Pd. | (.....) |

Disahkan oleh

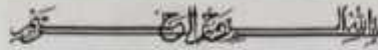
Decan FKIP
 Uppsmuh Makassar

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
 NBM. 860 934

Ketua Program Studi
 Pendidikan Pancasila dan
 Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd.
 NBM. 988 461





PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pelatihan Pendidikan dan Latihan Propesi Guru (PLPG)
 dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional di SMA Negeri 2
 Bantaeng.

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **Nasrun Arsyad**
 Stambuk : 10543.0072.14
 Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Program Studi : Strata 1 / S1
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat
 untuk diujikan.

Makassar, April 2019

Ditetapkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Andi Sugiat, M.Pd.

Dr. Mahajir, M.Pd.

Diketahui oleh

Dekan FKIP
 Ummuh Makassar

Ketua Prodi
 Pendidikan Pancasila dan
 Kewarganegaraan

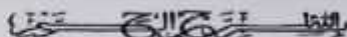
Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
 NBM. 860 934

Dr. Mahajir, M.Pd.
 NBM. 988 461



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jamat Kantor / Jl.Sultan Alauddin No.529 Tipe (0411) 860 837 Fax:(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-umh.info>



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasrun Arsyad
NIM : 10543 0072 14
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Judul Skripsi : Pengaruh Pelatihan PLPG dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di SMA Negeri 2 Bantaeng

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

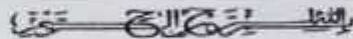
Makassar, 8 September 2018
Yang Membuat Pernyataan


Nasrun Arsyad



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jamat Kassar : Jl. Sultan Alauddin No.529 Tjgn (0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-umimuh.info>



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasrun Arsyad
NIM : 10543 0072 14
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 8 September 2018
Yang Membuat Perjanjian


Nasrun Arsyad

MOTTO

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kami dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan”.

(QS. Al-Mujadillah 58 : 11)

“Jadilah engkau orang yang berilmu (pandai) atau orang yang belajar atau orang yang mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka”.

(HR. Baehaqi)

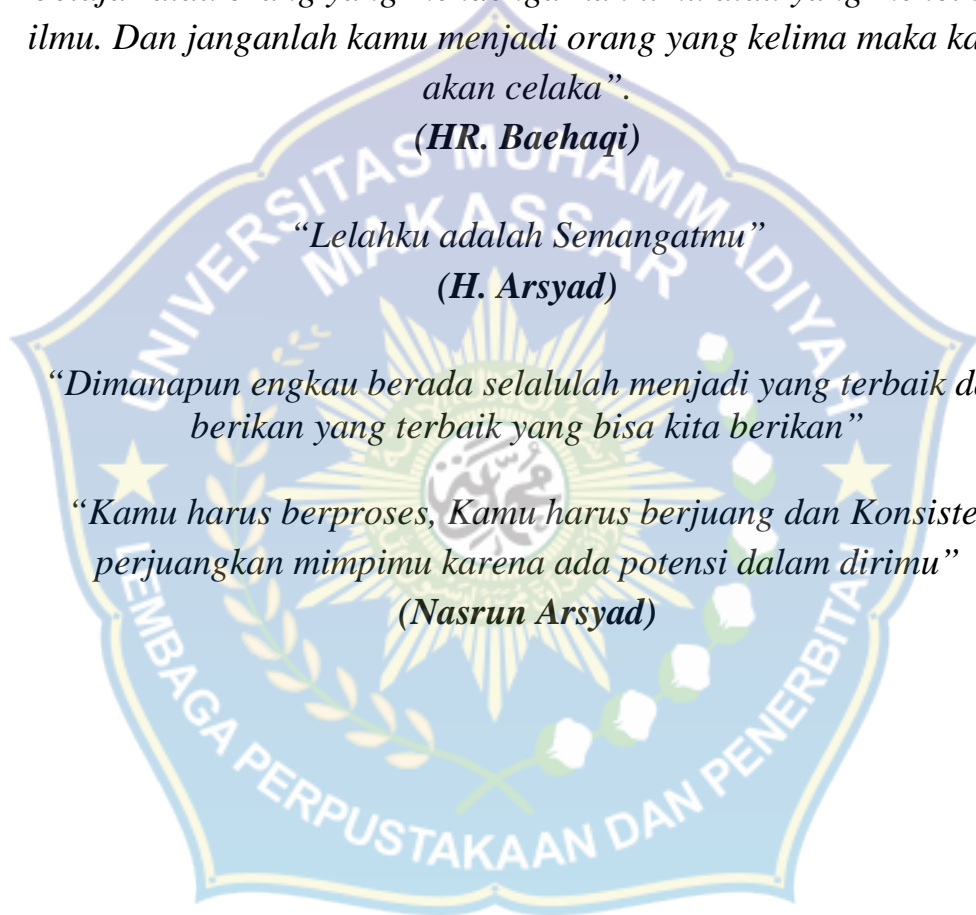
“Lelahku adalah Semangatmu”

(H. Arsyad)

“Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan”

“Kamu harus berproses, Kamu harus berjuang dan Konsisten perjuangkan mimpimu karena ada potensi dalam dirimu”

(Nasrun Arsyad)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya sayangi

Bapak dan Ibu Tercinta

*Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga
kupersembahkan karya kecil ini kepada:*

Bapak H. Arsyad dan Ibu Hj. Hartina

*yang telah memberikan kasih
sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak
mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata
cinta dan persembahan.
Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia karna
saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
Untuk Bapak dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu memberikan
kasih sayang, selalu mendoakan, selalu menasehati agar menjadi lebih baik,
Terima Kasih Bapak.... Terima Kasih Ibu....*

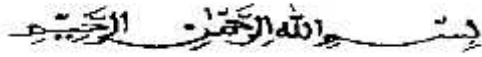
*Untuk adikku
Yuli Dewi Lestari Arsyad
tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama dan menjadi penghibur
dikala penat, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang
tak akan bisa tergantikan.*

*hanya karya
kecil ini yang dapat saya persembahkan.
Maaf belum pernah saya berikan suatu hal pun yang
berarti, tapi aku akan berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian...*

Almamater tercinta

Universitas Muhammadiyah Makassar

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun proposal ini dengan baik, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada keharibaan pemimpin sang Ilahi Rabbi Nabi Besar Muhammad SAW, Sang revolusioner sejati, Sosok pemimpin yang terpercaya, jujur, dan berakhlak karimah yang telah bersusah payah mengeluarkan manusia dari kungkungan kebidaban, sehingga sampai saat ini manusia mampu memposisikan diri sebagai warga negara yang senantiasa beriman dan bertaqwa di jalan Allah SWT.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penulis, proposal ini lahir dan tampil sebagai manifestasi dari suatu usaha yang tak mengenal lelah dan pantang menyerah. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa mulai dari penyusunan, hingga selesai proposal ini ditulis, tidak sedikit hambatan dan tantangan yang dialami penulis. Namun, hambatan dan tantangan tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, tidak berlebihan kalau sekiranya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua saya tercinta, Ayahanda H.Arsyad dan Ibunda Hj. Hartina atas segala doa dan dukungan tak terhingga yang selalu tercurah untuk keberhasilan ananda

2. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Erwin Akib, M.Pd., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Muhajir, M.Pd. Selaku Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah dengan tulus ikhlas meluangkan waktunya memberikan arahan selama proses penyusunan proposal ini.
5. Dr. Andi Sugiati, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
6. Dra. Jumiati Nur, M.Pd. Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Seminar PPKn yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan sebagai bekal di masa sekarang dan masa yang akan datang.
7. Teman teman seperjuanganku khususnya teman kelas PPKn B Angkatan 2014 yang selalu memberi motivasi dan dukungan dalam pembuatan proposal ini.
8. Serta semua pihak yang telah ikut serta memberikan bantuannya, yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal ibadah dan bantuan yang diberikan dengan tulus ikhlas serta limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa tercurah kepada kita. Amin .

Sebagai seseorang yang masih dalam taraf belajar, tentu saja proposal ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis dengan hati terbuka menerima segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif, guna perbaikan dan peningkatan kualitas penulis dimasa yang akan datang, karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan proposal ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, September 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
A. Kajian Pustaka	5
1. Kompetensi Guru	5
a. Pengertian Kompetensi	5

b. Guru	6
c. Syarat-syarat menjadi guru	7
d. Hak dan Kewajiban Guru.....	7
2. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru	8
a. Pengertian Pendidikan dan Latihan Profesi Guru	8
(PLPG)	10
b. Tujuan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)	10
c. Manfaat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)	11
3. Tinjauan tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).....	11
a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).....	16
b. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan.....	18
c. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	21
d. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan.....	23
B. Penelitian Yang Relevan	25
C. Kerangka Pikir	26
D. Hipotesis	27
E. Definisi Operasional Variabel	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian	29
1. Tempat Penelitian	29
2. Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data Penelitian	30

1. Data Primer	30
2. Data Sekunder	30
D. Populasi dan Sampel	30
1. Populasi	30
2. Sampel	32
E. Instrumen Penelitian	33
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	35
B. Deskripsi Data Penelitian.....	36
C. Hasil Penelitian dan Analisis Data.....	38
D. Pembahasan Data Penelitian	51
BAB V PENUTUP.....	53
A. Simpulan	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Jumlah Siswa Keseluruhan.....	32
3.2. Jumlah Siswa Kelas XII IPA 1.....	32
4.1. Tabel Distribusi Frekuensi Umur Responden.....	36
4.2. Tabel Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin.....	36
4.3. Kompetensi Profesional Guru.....	37
4.4. Hasil Uji Hipotesis.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian.....	27
3.1. Rumus T hitung.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Angket
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Uji Validitas.
4. Uji Reabilitas.
5. Lembar Pengesahan Proposal
6. Surat Keterangan Revisi
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Pendidikan dapat diperoleh dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat namun yang paling urgen adalah pendidikan di lingkungan sekolah.

Pendidikan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam hal ini guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling penting untuk di perhatikan oleh pemerintah karena guru mempunyai peranan yang besar dan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, sebab gurulah yang berhadapan langsung dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan tanpa melupakan komponen yang lain termasuk tujuan pendidikan, peserta didik, kurikulum, lingkungan pendidikan dan interaksi edukatif serta alat pendidik. Adapun pengertian guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik, tuntutan profesionalisme guru harus disikapi dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi, apalagi sekarang ada keharusan mengikuti uji sertifikasi untuk menentukan kelayakan seseorang. Oleh karena itu, guru diharapkan melakukan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

Tujuan utama dari PLPG adalah untuk mendapatkan sertifikasi selain itu PLPG juga berfungsi untuk meningkatkan martabat seorang guru dan peran guru sebagai agen pembelajaran, untuk itu guru yang telah lulus PLPG dianggap sebagai tenaga pendidik yang profesional yang mampu mendidik dengan baik agar dapat meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Namun pada kenyataan yang ada di lapangan guru seringkali ditemukan tidak memiliki kompetensi profesional yang seharusnya dimiliki untuk menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam pendidikan, sehingga biasanya tujuan dari pembelajaran tidak tercapai karena tidak efektifnya saat guru mengajar di kelas. Hal ini menyebabkan mutu pendidikan sulit untuk meningkat.

SMA Negeri 2 Bantaeng merupakan salah satu sekolah yang ada di Bantaeng yang memiliki guru yang telah lulus PLPG, untuk itu diharapkan agar guru yang telah lulus PLPG di sekolah tersebut dapat memiliki kompetensi profesional.

Bertitik tolak dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelatihan**

PLPG dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di SMA Negeri 2 Bantaeng”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bisa ditarik berdasarkan latar belakang diatas, yakni :

1. Bagaimana kompetensi guru sebelum mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di SMA Negeri 2 Bantaeng ?
2. Bagaimana kompetensi guru setelah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di SMA Negeri 2 Bantaeng ?
3. Bagaimana pengaruh Pendidikan dan Latihan Profesi Guru terhadap kompetensi guru di SMA Negeri 2 Bantaeng ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Bagaimana kompetensi guru sebelum mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di SMA Negeri 2 Bantaeng.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kompetensi guru setelah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di SMA Negeri 2 Bantaeng.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Pendidikan dan Latihan Profesi Guru terhadap kompetensi guru di SMA Negeri 2 Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai peran pelatihan PLPG dalam meningkatkan kompetensi profesional guru sebagai suatu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada pembelajaran pendidikan PPKn.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Guru

Dapat menambah wawasan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan profesionalnya dalam proses pembelajaran.

b. Bagi Peneliti

Menambah wawasan penulis tentang ruang lingkup pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dalam upaya meningkatkan kompetensi guru.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Kompetensi Guru

a. Pengertian Kompetensi

Menurut Undang-Undang Republik Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 Tentang Guru dan Dosen menyatakan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Permendikbud No. 19 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 menyatakan **Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.**

Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi. Dengan kata lain kompetensi dapat dipahami sebagai kecakapan atau kemampuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan.

Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna sebagaimana yang dikemukakan oleh Broke and Stone bahwa

kompetensi merupakan gambaran hakikat dari perilaku yang tampak sangat berarti.

Permendikbud Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan “standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rastodio (2009) adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja berkriteria efektif dan unggul dalam situasi tertentu.

b. Guru

Secara definisi sebutan guru tidak termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS. Didalam UU No. 20 Tahun 2003, sesungguhnya guru dan pendidik merupakan dua hal yang berbeda kata *pendidik* (Bahasa Indonesia) merupakan kata yang sama dengan kata *educator* (Bahasa Inggris). Di dalam kamus *Webster* kata *educator* berarti *educationist* atau *educationalist* yang dalam Bahasa Indonesia adalah pendidik.

Di dalam kamus *Webster*, kata *teacher* bermakna sebagai “*the person who teach, especially inschool*” atau guru adalah seseorang yang mengajar khususnya di sekolah sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa. “pendidik merupakan yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan

pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.

c. Syarat-Syarat Menjadi Guru

Dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 18 disebutkan ada syarat menjadi seorang Guru :

- 1) Memiliki kualifikasi akademik.
- 2) Memiliki kompetensi.
- 3) Memiliki sertifikat pendidik.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

d. Hak dan Kewajiban Guru

Guru merupakan jabatan profesional, maka setiap guru harus mengetahui dengan benar apa hak-hak dan kewajiban selaku tenaga profesional. Pasal 14 ayat (1) UU. No. 4 tahun 2005. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak :

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi.
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

- 5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- 6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.
- 7) Memperoleh rasa aman dalam jaminan dalam melaksanakan tugas.
- 8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- 9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- 10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- 11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidang.

2. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

a. Pengertian Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 20 tahun 2003, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam Permendikbud Nomor 29 Tahun 2016 pasal 1 ayat 3 disebutkan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru adalah yang selanjutnya disingkat PLPG salah satu pola sertifikasi guru yang

diangkat sebelum tahun 2016 yang memenuhi persyaratan sesuai dengan permendikbud ini.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, memantapkan penguasaan dan kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi. Pelaksanaan kegiatan berskala nasional seperti sertifikasi guru ini tentunya mempunyai tujuan.

Setelah standar kualifikasi dan kompetensi guru terpenuhi masih ada satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai guru profesional yaitu sebagaimana pada Pasal 11 UU Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 yaitu guru yang sudah lulus proses sertifikasi sebagaimana dibawah ini.

- 1) Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- 2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.

Sertifikasi bagi calon guru (yang telah menjadi guru sejak lahirnya UU Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005) dilaksanakan melalui pendidikan profesi, yaitu pendidikan selama satu tahun setelah S1

(baik bagi alumni keguruan atau non keguruan). Yang diakhiri dengan uji coba kompetensi keguruan. Adapun bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji portofolio.

b. Tujuan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Permendikbud Nomor 37 Pasal 2 Tahun 2017 Tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan, sehingga memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

- 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- 3) Meningkatkan martabat guru.
- 4) Meningkatkan profesionalisme guru.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya PLPG untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik untuk mengembangkan baik wawasan, keahlian maupun perilaku dari seorang guru.

c. Manfaat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Adapun manfaat Pendidikan dan Latihan Profesi guru sebagai berikut :

- 1) Peningkatan produktivitas organisasi secara keseluruhan.

- 2) Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan.
- 3) Terjadi proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
- 4) Timbul dorongan pada diri untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya.
- 5) Peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stres, frustrasi dan konflik.
- 6) Meningkatkan kepuasan kerja.
- 7) Semakin besar pengakuan atas kemampuan seorang.
- 8) Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru dimasa depan.

3. Tinjauan tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan kewarganegaraan menurut dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dan pemerintah agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar Isi Pendidikan Nasional, PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila.

Pengertian PKN kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana/acuan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia cerdas, terampil, berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (KTSP, 2004:49).

Secara ontologi, Pendidikan Kewarganegaraan berkembang dari konsep “*civics*”. Secara harfiah, *civics* berasal dari bahasa Latin “*civicus*” yang artinya warga negara. Secara akademis *civics* sebagai embrio dari “*civics education*”, kemudian di Indonesia menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan” (PKN).

Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan *civics* adalah *citizenship*. Dalam hubungan ini Stanley E Dimond, seperti dikutip Somantri, menjelaskan rumusan sebagai berikut : “*Citizenship as it relates to school activities has two fold meanings. In a narrow-sense, citizenship includes only legal status in country and the activities closely related to the political function-voting, governmental organization, holding of office, and legal right and responsibility....*” (*Citizenship* sebagaimana berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit, *citizenship*

hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak-hak hukum dan tanggung jawab). Dari perspektif ini, *civics* dan *citizenship* erat kaitannya dengan urusan warga negara dan negara.

Permendikbud Nomor 21,22 dan 23 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian.

1. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan dasar dan Menengah yang di gunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.
2. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat tentang Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu, kompetensi inti meliputi sikap spritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensu lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan kriteria

mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.

4. Permendikbud NO. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan yang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Muhammad Numan Soemantri merumuskan pengertian *civics* sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan :

- a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik).
- b) individu-individu dengan negara. Jauh sebelum itu, bahwa makna *civics* selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara. Pengertian ini menunjukkan bahwa *civics* merupakan cabang dari ilmu politik, sebagaimana tertuang dalam *Dictionary of Education*.

Menurut Azra, Azyumardi (2008) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal, seperti: pemerintahan, konstitusi,

lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang HAM, kewarganegaraan aktif, dan sebagainya.

Senada dengan pandangan Azra, Zamroni (2001) berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain; kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Pemahaman lain tentang Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy*, dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.

PKn adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu

diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin 2000: 9).

(Tim Dosen, 2010:1), “Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

b. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Permendikbud Nomor 21, 22 dan 23 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian.

1. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan dasar dan Menengah yang di gunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

2. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat tentang Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu, kompetensi inti meliputi sikap spritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.
4. Permendikbud NO. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan yang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan kurikulum 2013 berfungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

Soemantri (2001: 166) fungsi PKn sebagai usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada siswa agar menjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan Kewarganegaraan untuk melandasi tujuan nasional yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari.

Berdasarkan fungsi diatas, penulis menyimpulkan PKn berfungsi sebagai wahana pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, dan dalam PKn juga mempunyai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreatifitas. Siswa dalam proses pembelajaran harus dinamis dan mampu menarik perhatian siswa yaitu dengan cara guru membantu mengembangkan pemahaman baik materi maupun keterampilan intelektual dan partisipasi yang menghasilkan pemahaman tentang arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

c. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu, negara

mengatur hal-hal yang ada didalamnya termasuk mengenai sistem kewarganegaraan

Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara peradaban.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (kurikulum KTSP, 2006).

Sebagai mata pelajaran yang penting pada semua jenjang pendidikan, mata pelajaran PKN memiliki tujuan yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran. Tujuan utama PKN adalah untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia yang antara lain:

- a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa.
- c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.

Mulyasa (dalam Ruminiati, 2007: 1.26) menyatakan tujuan pembelajaran PKn adalah untuk menjadikan siswa:

- 1) Mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negara.
- 2) Mau berpartisipasi secara aktif dalam segala bidang kegiatan dan bertanggung jawab, sehingga dapat bertindak cerdas dalam segala kegiatan.
- 3) Dapat berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Mampu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain baik secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

Berdasarkan tujuan diatas, penulis menyimpulkan PKn bertujuan untuk membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan siswa meyakini nilai-nilai Pancasila dan ikut serta dalam berpartisipasi secara aktif dalam segala bidang serta bertanggung jawab sehingga dapat bertindak cerdas dalam segala kegiatan, membentuk diri

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

d. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 2 menyebutkan “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, dinyatakan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan perlibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Dalam standar isi 2006 dijelaskan bahwa Pkn dalam persekolahan atau mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya

Sebagaimana layaknya suatu bidang studi yang diajarkan disekolah materi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Branson (1999: 4) harus

mencakup tiga komponen, yaitu *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *Civic Disposition* (watak kewarganegaraan). Komponen pertama, *Civic Knowledge* “berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara” (Branson, 1999: 8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih rinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Kedua *Civic Skills* meliputi Keterampilan Intelektual (*intellectual skill*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh: keterampilan intelektual yaitu keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh: keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui.

Ketiga, *Civic Disposition* (watak-watak kewarganegaraan), komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantive dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap, dan potensi lain yang bersifat afektif.

Berdasarkan rumusan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan antara lain menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, pada jenjang pendidikan menengah terdiri atas lima kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian. Kelompok mata pelajaran ini dimaksud untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

B. Penelitian Yang Relevan

Untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan faktualitas penelitian ini, maka peneliti mengadakan telaah pustaka dari peneliti-peneliti sebelumnya

yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dengan mempertimbangkan kedekatan variabel-variabel yang digunakan. Adapun telaah pustaka yang di gunakan yakni :

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Irnawati** dalam skripsi yang berjudul “Kontribusi pendidikan dan pelatihan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn”. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh **Aprian Syarif Hidayat** dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dalam menunjang profesionalisme guru IPS”. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa terjadi hubungan antara Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dengan profesionalisme guru IPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai r hitung sebesar 0,707 dan termasuk dalam kategori sedang, dari hasil pengujian diperoleh F sebesar 11.116 dengan tingkat signifikansi (sig) sama dengan atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga disimpulkan terdapat pengaruh antara Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dengan profesionalisme guru IPS, dengan R square sebesar 49,9%

Dengan demikian terdapat hubungan yang kuat antara Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dengan profesionalisme guru IPS di SMP se-Kecamatan Sawangan Depok Jawa Barat.

C. Kerangka Pikir

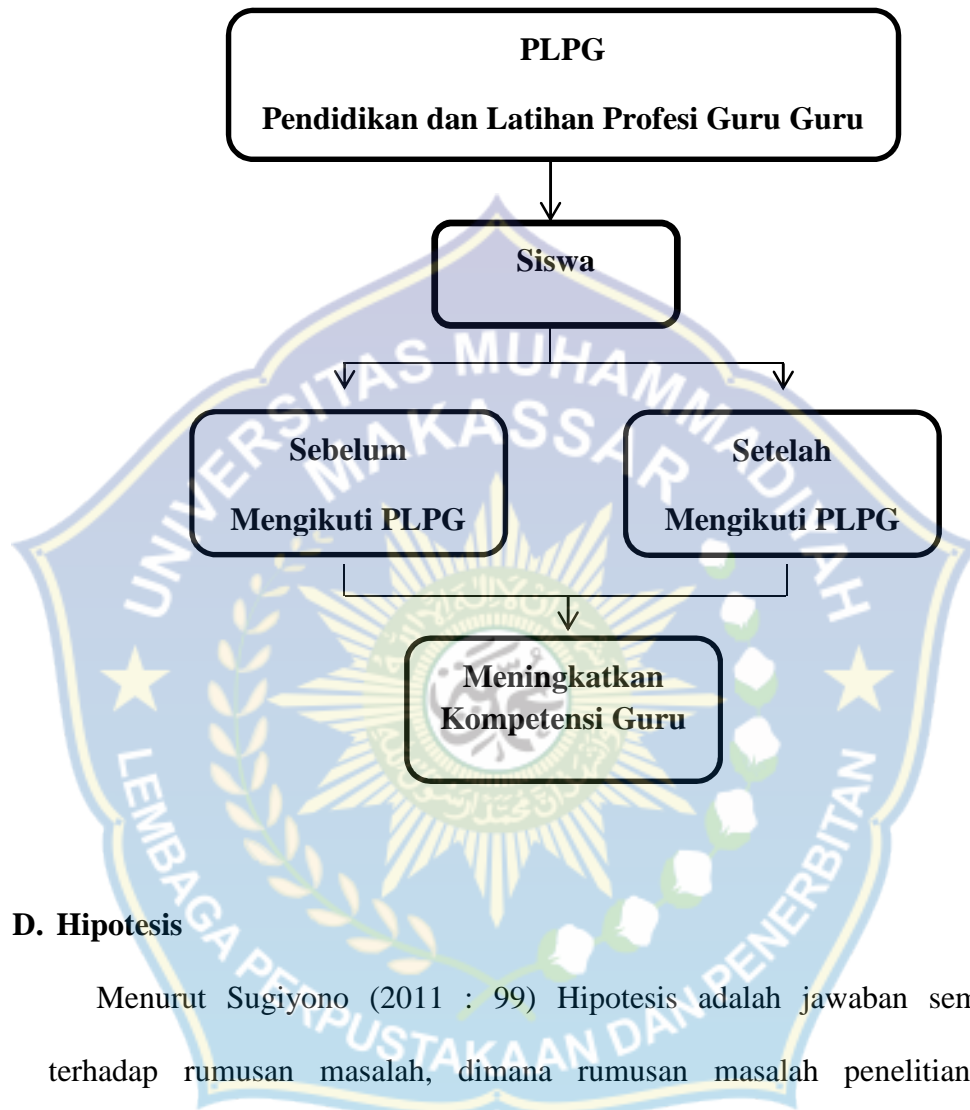
Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2016: 60) mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka pikir digunakan untuk membantu peneliti memusatkan hubungan antar variabel. Kerangka pikir dalam penelitian ini berupa PLPG untuk meningkatkan kompetensi guru.

1. PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) adalah sebuah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah di atur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerja sama dengan instansi pendidikan tinggi komponen, yang di akhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.
2. Hubungan kompetensi guru dengan PLPG sangat erat kaitannya karena dengan PLPG merupakan salah satu bentuk kegiatan dari program pengembangan kompetensi guru.
5. Tujuan dari PLPG salah satu cara untuk meningkatkana kompetensi guru.

Kerangka pikir dalam penelitian ini terdapat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011 : 99) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah di uraikan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara pelatihan PLPG dengan kompetensi guru.

Hi : Ada pengaruh signifikan anantara pelatihan PLPG dengan

kompetensi guru.

Untuk memutuskan mana hipotesis yang dipilih perhatikan nilai yang ditunjukkan oleh **sig. (2-tailed)** pada output yang dihasilkan oleh setelah pengolahan data, penelitian ini menggunakan analisis satu ekor sehingga untuk mendapatkan nilai **sig. (1-tailed)** adalah membagi 2 hasil **sig. (2-tailed)**.

Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

Jika signifikansi $(0,05)$ maka H_0 ditolak.

Jika signifikansi $(0,05)$ maka H_1 diterima.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah “kompetensi guru” sebagai variabel terikat dan “Pelatihan PLPG” sebagai variabel bebas. Hal tersebut dikarenakan pelatihan PLPG yang menjadi sebab terjadinya perubahan terhadap kompetensi guru. Adapun definisi operasional variabel yang akan di operasionalkan adalah sebagai berikut.

1. Kompetensi guru adalah penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru, kompetensi yang dikaji dalam penelitian ini kompetensi profesional guru di SMA Negeri 2 Bantaeng.
2. Sebelum mengikuti PLPG dimana guru masih belum memiliki kompetensi profesional yang seharusnya dimiliki untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik.

3. Setelah mengikuti PLPG dimana guru telah memiliki sertifikat pendidik karena telah memenuhi persyaratan uji kelayakan guru sebagai tenaga profesional.
4. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya, Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data serta penampilan dari hasilnya. Menurut Sugiyono (2012:7) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti melakukan penelitian atau tempat dimana penelitian itu dilakukan. Penelitian ini dilakukan di sekolah SMA Negeri 2 Bantaeng di Kabupaten Bantaeng.

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September pada tahun ajaran 2018-2019.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat. Data primer yang diperoleh adalah data mengenai pelatihan PLPG dalam meningkatkan kompetensi guru SMA Negeri 2 Bantaeng di Kabupaten Bantaeng melalui Angket dan Observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, majalah ilmiah dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai peran pelatihan PLPG dalam meningkatkan kompetensi guru, dengan jumlah guru yang telah PLPG 19 orang dan sebelum PLPG 20 orang.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Bantaeng dengan jumlah 881 Orang.

Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah Siswa
	Laki-Laki	Perempuan	
X	123	146	269
XI	145	191	336
XII	128	148	276
Total			881

No.	Nama Guru	Jenis Kelamin	Umur	PLPG	
				Belum	Telah
1.	Ar	L	53	✓	
2.	Bo	L	51	✓	
3.	Di	P	40	✓	
4.	EMS	L	36	✓	
5.	F S	L	27	✓	
6.	Ni	P	25	✓	
7.	Hh	P	45	✓	
8.	Hah	P	49	✓	
9.	Hi	P	49	✓	
10.	Hti	P	35	✓	
11.	Mai	P	54	✓	
12.	Mt	L	53	✓	
13.	MS	L	40	✓	
14.	Na	P	51	✓	
15.	Nm	P	40	✓	
16.	Na	P	37	✓	
17.	RJ	P	58	✓	
18.	SF	P	39	✓	
19.	SH	P	33	✓	
20.	SS	P	29	✓	
21.	Am	L	37		✓
22.	Aa	P	56		✓
23.	AA	L	45		✓

24.	Ha	P	53		✓
25.	Hi	L	33		✓
26.	Hn	L	55		✓
27.	Hi	P	36		✓
28.	Jn	L	41		✓
29.	LS	P	55		✓
30.	Ma	P	43		✓
31.	Mi	P	49		✓
32.	MT	L	36		✓
33.	MY	L	36		✓
34.	Mr	L	56		✓
35.	Hh	P	53		✓
36.	Ni	P	47		✓
37.	Ni	P	53		✓
38.	Ra	P	56		✓
39.	Sa	P	49		✓

2. Sampel.

Sampel merupakan bagian dari populasi, pada penelitian ini sampelnya siswa di sekolah SMA Negeri 2 Bantaeng sebanyak 29 orang.

Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana teknik *purposive sampling* merupakan pengambilan data dipilih dengan pertimbangan tertentu.

Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah Siswa
	Laki-Laki	Perempuan	
XII IPA I	9	20	29

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	PLPG	
				Belum	Telah
1.	Hi	P	45		✓
2.	Ni	p	25	✓	

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah merupakan alat yang menggunakan dalam menggali data dalam penelitian ini data digali dengan instrumen yaitu peneliti itu sendiri yang langsung melakukan penyaksian terhadap fenomena-fenomena yang berhubungan dengan objek yang di selidiki dengan merupakan alat bantu instrument observasi, angket dan kajian-kajian dokumen.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi, dokumentasi dan angket.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat langsung fenomena-fenomena terhadap bagaimana profesionalisme guru dalam mengajar.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengambil terkait pengaruh pelatihan PLPG dalam meningkatkan kompetensi guru.

3. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji hipotesis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik uji t .

$$t_{hitung} = \frac{r_{xy} \sqrt{(n - 2)}}{\sqrt{(1 - r_{xy}^2)}}$$

2. Uji Data Angket

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase dari hasil angket adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan :

P : Persentase Jawaban

F : Frekuensi Jawaban Responden

n : Jumlah Responden



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMAN 2 Bantaeng yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah ini mulai berdiri pada tahun 1985 berdasarkan SK Nomor 188.4/016/08.01.01/SK/XI/2013.

SMAN 2 Bantaeng merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Bantaeng yang rata-rata gurunya telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. Oleh karena itu, guru yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru diharapkan dapat memiliki kompetensi profesional saat membimbing siswa-siswinya.

Proses Belajar Mengajar (PBM) di SMAN 2 Bantaeng saat ini yang dilakukan oleh guru yang belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dan yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru mulai dari membuka pelajaran hingga menyimpulkan pelajaran terdapat perbedaan. Guru yang belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru hanya menggunakan metode yang masih bersifat tradisional sedangkan guru yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru ketika mengajar dia menggunakan metode yang berbeda sehingga siswa bisa lebih aktif dan termotivasi lagi untuk belajar.

Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru yang diterapkan oleh pemerintah sangat dirasakan manfaatnya di SMAN 2 Bantaeng, karena

terbukti dari PBM yang dilakukan oleh guru yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru bisa meningkatkan minat belajar siswa dengan berbagai keterampilan dan pengalaman yang ditunjukkan. Hal ini sangat berbeda dengan guru yang belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

B. Deskripsi Data Penelitian

No.	Nama Guru	Jenis Kelamin	Umur	PLPG	
				Sebelum	Setelah
1.	Anwar	L	53	✓	
2.	Budianto	L	51	✓	
3.	Darmawati	P	40	✓	
4.	Ero Muhtho'at Suhaemi	L	36	✓	
5.	Fajar. S	L	27	✓	
6.	Nurfitri	P	25	✓	
7.	Hasnah	P	45	✓	
8.	Hasniah	P	49	✓	
9.	Hasriani	P	49	✓	
10.	Husniati	P	35	✓	
11.	Maryuni	P	54	✓	
12.	Muhammad Natsir	L	53	✓	
13.	Muhammad Saleh	L	40	✓	
14.	Nurhikma	P	51	✓	
15.	Nurhikmah	P	40	✓	

16.	Nurlaela	P	37	✓	
17.	Rosmiati. J	P	58	✓	
18.	Siti Faridah	P	39	✓	
19.	Sri Handayana	P	33	✓	
20.	Sri Sulaeha	P	29	✓	
21.	Abdurrahim	L	37		✓
22.	Adriana	P	56		✓
23.	Amsarif Anwar	L	45		✓
24.	Halija	P	53		✓
25.	Hamriadi	L	33		✓
26.	Hasan	L	55		✓
27.	Hasmawati	P	36		✓
28.	Jamaluddin	L	41		✓
29.	Lilis Suparmi	P	55		✓
30.	Mantasia	P	43		✓
31.	Mardia	P	49		✓
32.	Muhammad Tawil	L	36		✓
33.	Muhammad Yunus	L	36		✓
34.	Muhtar	L	56		✓
35.	Hafisah	P	53		✓
36.	Nur Indayani	P	47		✓
37.	Nurhayati	P	53		✓
38.	Rostina	P	56		✓
39.	Sartina	P	49		✓

C. Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Uji Data Angket

Untuk menafsirkan hasil angket peneliti berpedoman dengan data berikut:

0 %	Tidak ada seorangpun
1%-5%	Hampir tidak ada
6%-25%	Sebagian kecil
26%-49%	Hampir setengahnya
50%	Setengahnya
51%-75%	Lebih dari setengah
76%-95%	Sebagian besar
96%-99%	Hampir seluruhnya
100%	Seluruhnya

Sumber : Kusmiati, 2004

Pembahasan hasil angket berdasarkan urutan pernyataan sebagai berikut :

a. Sebelum Mengikuti PLPG

1) Apakah guru menjelaskan secara struktur

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	16	55,17%
Tidak	13	44,82%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 16 orang dengan persentase

55,17% dan jawaban “Tidak” sebanyak 13 orang dengan persentase 44,82%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang belum melakukan PLPG Apakah guru menjelaskan secara struktur lebih dari setengah responden menjawab ya.

2) Apakah guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kenyataan yang real/nyata

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	12	41,37%
Tidak	17	58,62%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 12 orang dengan persentase 41,37% dan jawaban “Tidak” sebanyak 17 orang dengan persentase 58,62%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang belum melakukan PLPG Apakah guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kenyataan yang real/nyata hampir setengah responden menjawab ya.

3) Terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	13	44,82%
Tidak	16	55,17%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi

jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 13 orang dengan persentase 44,82% dan jawaban “Tidak” sebanyak 16 orang dengan persentase 55,17%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang belum melakukan PLPG Terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik hampir setengah responden menjawab ya.

4) Apakah guru dalam menjelaskan memberikan contoh

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	15	51,72 %
Tidak	14	48,27%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 15 orang dengan persentase 51,72% dan jawaban “Tidak” sebanyak 14 orang dengan persentase 48,27%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang belum melakukan PLPG Apakah guru dalam menjelaskan memberikan contoh lebih dari setengah responden menjawab ya.

5) Apakah guru mampu menjawab berbagai pertanyaan siswa

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	17	58,62%
Tidak	12	41,37%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi

jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 17 orang dengan persentase 58,62% dan jawaban “Tidak” sebanyak 12 orang dengan persentase 41,37%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang belum melakukan PLPG Apakah guru mampu menjawab berbagai pertanyaan siswa hampir setengah responden menjawab ya.

6) Apakah guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi pembelajaran yang lain

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	14	48,27%
Tidak	15	51,72%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 14 orang dengan persentase 48,72% dan jawaban “Tidak” sebanyak 15 orang dengan persentase 51,27%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang belum melakukan PLPG Apakah guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi pembelajaran yang lain hampir setengahnya responden menjawab ya.

7) Apakah guru menggunakan media pembelajaran

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	16	55,17%
Tidak	13	44,82%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 16 orang dengan persentase 55,17% dan jawaban “Tidak” sebanyak 13 orang dengan persentase 44,82%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang belum melakukan PLPG Apakah guru menggunakan media pembelajaran lebih dari setengah responden menjawab ya

8) Apakah media pembelajaran itu menarik

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	15	51,72%
Tidak	14	48,27%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 15 orang dengan persentase 51,72% dan jawaban “Tidak” sebanyak 14 orang dengan persentase 48,27%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang belum melakukan PLPG Apakah media pembelajaran itu menarik lebih dari setengah responden menjawab ya

9) Apakah media pembelajaran itu mudah dipahami oleh siswa

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	15	51,72%
Tidak	14	48,27%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 15 orang dengan persentase 51,72% dan jawaban “Tidak” sebanyak 14 orang dengan persentase 48,27%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang belum melakukan PLPG Apakah media pembelajaran itu mudah dipahami oleh siswa lebih dari setengah responden menjawab ya.

10) Apakah guru sering menggunakan media dalam pembelajaran

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	13	44,82%
Tidak	16	55,17%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 13 orang dengan persentase 44,82% dan jawaban “Tidak” sebanyak 16 orang dengan persentase 55,17%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang belum melakukan PLPG Apakah guru sering menggunakan media dalam pembelajaran hampir setengahnya responden menjawab ya..

11) Apakah guru menggunakan audio visual dalam pembelajaran

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	14	48,27%
Tidak	16	55,17%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 14 orang dengan persentase 48,72% dan jawaban “Tidak” sebanyak 15 orang dengan persentase 51,27%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang belum melakukan PLPG Apakah guru menggunakan audio visual dalam pembelajaran hampir setengahnya responden menjawab ya.

b. Setelah Mengikuti PLPG

1) Apakah guru menjelaskan secara struktur

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	23	79,31%
Tidak	6	20,68%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” sebanyak 23 orang dengan persentase 79,31% dan jawaban “Tidak” sebanyak 6 orang dengan persentase 20,68%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang telah melakukan PLPG dalam menjelaskan secara struktur sebagian besar responden menjawab ya.

2) Apakah guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kenyataan yang real/nyata

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	22	75,86%
Tidak	7	24,13%

Jumlah	29	100%
--------	----	------

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 22 orang dengan persentase 75,86% dan jawaban “Tidak” sebanyak 7 orang dengan persentase 24,13%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang telah melakukan PLPG dalam guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kenyataan yang real/nyata lebih dari setengah responden menjawab ya.

3) Terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	24	82,75%
Tidak	5	17,24%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” sebanyak 24 orang dengan persentase 82,75% dan jawaban “Tidak” sebanyak 5 orang dengan persentase 17,24%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang telah melakukan PLPG dalam terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik sebagian besar responden menjawab ya.

4) Apakah guru dalam menjelaskan memberikan contoh

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	25	86,20%
Tidak	4	13,79%

Jumlah	29	100%
--------	----	------

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 25 orang dengan persentase 86,20% dan jawaban “Tidak” sebanyak 4 orang dengan persentase 13,79%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang telah melakukan PLPG guru dalam menjelaskan memberikan contoh sebagian besar responden menjawab ya.

5) Apakah guru mampu menjawab berbagai pertanyaan siswa

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	25	86,20%
Tidak	4	13,79%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 25 orang dengan persentase 86,20% dan jawaban “Tidak” sebanyak 4 orang dengan persentase 13,79%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang telah melakukan PLPG Apakah guru mampu menjawab berbagai pertanyaan siswa sebagian besar responden menjawab ya.

6) Apakah guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi pembelajaran yang lain

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	20	68,96%

Tidak	9	31,03%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” sebanyak 20 orang dengan persentase 68,96% dan jawaban “Tidak” sebanyak 9 orang dengan persentase 31,03%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang telah melakukan PLPG Apakah guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi pembelajaran yang lain lebih dari setengah responden menjawab ya.

7) Apakah guru menggunakan media pembelajaran

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	24	82,75%
Tidak	5	17,24%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” sebanyak 24 orang dengan persentase 82,75% dan jawaban “Tidak” sebanyak 5 orang dengan persentase 17,24%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang telah melakukan PLPG Apakah guru menggunakan media pembelajaran hampir seluruhnya responden menjawab ya.

8) Apakah media pembelajaran itu menarik

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	22	82,75%

Tidak	5	17,24%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” sebanyak 24 orang dengan persentase 82,75% dan jawaban “Tidak” sebanyak 5 orang dengan persentase 17,24%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang telah melakukan PLPG Apakah media pembelajaran itu menarik hampir seluruhnya responden menjawab ya..

9) Apakah media pembelajaran itu mudah dipahami oleh siswa

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	24	82,75%
Tidak	5	17,24%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” sebanyak 24 orang dengan persentase 82,75% dan jawaban “Tidak” sebanyak 5 orang dengan persentase 17,24%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang telah melakukan PLPG Apakah media pembelajaran itu mudah dipahami oleh siswa hampir seluruhnya responden menjawab ya.

10) Apakah guru sering menggunakan media dalam pembelajaran

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	22	75,86%

Tidak	7	24,13%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” pada pernyataan pertama sebanyak 22 orang dengan persentase 75,86% dan jawaban “Tidak” sebanyak 7 orang dengan persentase 24,13%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang telah melakukan PLPG Apakah guru sering menggunakan media dalam pembelajaran lebih dari setengah responden menjawab ya.

11) Apakah guru menggunakan audio visual dalam pembelajaran

Pilihan Jawaban	Total Jawaban	Persentase
Ya	19	65,51%
Tidak	10	34,48%
Jumlah	29	100%

Berdasarkan dari hasil angket yang terdapat pada tabel tersebut diketahui jumlah responden 29 orang. Responden yang memberi jawaban “Ya” sebanyak 19 orang dengan persentase 65,51% dan jawaban “Tidak” sebanyak 10 orang dengan persentase 34,48%. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang telah melakukan PLPG Apakah guru menggunakan audio visual dalam pembelajaran lebih dari setengah responden menjawab ya.

2. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji analisis data maka dapat diketahui memiliki varians yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa kelompok tersebut homogen sehingga pengujian hipotesis bisa dilakukan.

Group Statistics

Guru	N	Mean	Std. Deviation	Std. error mean
Hasil sebelum	29	7,0000	1,53530	,28510
setelah	29	10,7586	1,43066	,26567

Independent Samples Test

Kompetensi Guru		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)
Hasil	Equal Variances assumed	,081	,777	9,645	56	,002
	Equal Variances not assumed			9,645	55,72	,002

Tabel . Hasil Uji t

Dari hasil pengujian uji t menggunakan rumus *independent sample test* nilai $\text{sig} = ,777$ berada pada baris *Equal Variances Assumed* maka signifikansi uji t dibaca pada baris tersebut 1 sisi nilai signifikansi dibagi 2, sehingga nilai signifikansi adalah 0,001 dengan nilai uji t adalah ,081 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan jika signifikansi adalah $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak, sementara H_1 diterima menunjukkan bahwa pelatihan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru mempunyai pengaruh terhadap kompetensi profesional.

D. Pembahasan Data Penelitian

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme, memantapkan penguasaan dan kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dan menentukan kelulusan guru sebagai peserta sertifikasi.

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Irnawati** dalam judul skripsi “Kontribusi Pendidikan dan PLPG dalam meningkatkan kompetensi guru PPKn” Program studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dengan penelitian yang menunjukkan terdapat pengaruh kontribusi pendidikan dan PLPG dalam meningkatkan kompetensi guru, begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh **Aprian Syarif Hidayat** dengan judul skripsi “Pengaruh Pendidikan dan PLPG dalam Menunjang Profesionalisme Guru IPS” Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Jakarta.

Berdasarkan hasil yang didapat pada penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 2 Bantaeng mengenai pengaruh pelatihan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru terhadap kompetensi profesional guru jika dibandingkan dengan guru yang belum melakukan pelatihan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dan guru yang telah melakukan pelatihan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru memiliki perbedaan dalam hal kompetensi profesional guru sesuai dengan yang diharapkan peneliti dengan hasil yang optimal.

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian uji t menggunakan rumus *independent sample test* nilai sig = ,777 berada pada baris *Equal Variances Assumed* maka signifikansi uji t dibaca pada baris tersebut 1 sisi nilai signifikansi dibagi 2, sehingga nilai signifikansi adalah 0,001 dengan nilai uji t adalah ,081 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan jika signifikansi adalah $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak, sementara H_1 diterima menunjukkan bahwa pelatihan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru mempunyai pengaruh terhadap kompetensi profesional di SMA Negeri 2 Bnataeng.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian uji t menggunakan rumus *independent sample test* nilai sig = ,777 berada pada baris *Equal Variances Assumed* maka signifikansi uji t dibaca pada baris tersebut 1 sisi nilai signifikansi dibagi 2, sehingga nilai signifikansi adalah 0,001 dengan nilai uji t adalah ,081 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan jika signifikansi adalah $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak, sementara H_1 diterima menunjukkan bahwa pelatihan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru mempunyai pengaruh terhadap kompetensi profesional di SMA Negeri 2 Bnataeng.

B. Saran

Setelah melewati setiap langkah dalam penelitian ini dan telah disesuaikan dengan prosedur penelitian yang ditetapkan, maka diperoleh hasil penelitian yang telah kemukakan pada kesimpulan, Namun demikian pada kesempatan ini peneliti mengemukakan saran-saran sebagai masukan atau pun bahan pertimbangan pada masa yang akan datang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya:

1. Bagi Dinas Pendidikan

Dengan diberlakukannya program sertifikasi guru, kinerja guru dalam hal perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran menunjukkan kinerja yang baik.

2. Bagi guru

Untuk menjaga kualitas guru bersertifikat pendidik kemampuan guru dalam hal perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar kompetensi guru.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriani Syarif Hidayat. *Pengaruh Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dalam Menunjang Profesionalisme Guru IPS*. Diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
- Azmuyardi, Azra., 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta.
- Branson, 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika..* Yogyakarta: Ikis
- Cholisin, 2000. *Materi Pokok Ilmu Kewarganegaraan-Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta.
- Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Oemar Hamalik 2006, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rastodio, 2009, *Kompetensi Guru*, Jakarta; Bumi Aksara, Jaya Negara
- Ruminiati, 2007. *Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Sevilla, dkk, 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Pres.
- Soemantri, 2001. *Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yudi Bakti. *Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru dalam meningkatkan profesional guru PPKn. 2010/2011 Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diakses pada tanggal 28 maret 2018

Zamroni, 2001. *Pendidikan Untuk Demokrasi*. Bilgraf Publising, Yogyakarta.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 tentang sistem Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dan Jabatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Undang-Undang Nomor 22 Pasal 39 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar Isi Pendidikan Nasional.

Permendikbud No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Permendikbud Nomor . 21,22 dan 23 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan.

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 tentang sertifikat pendidik.

Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 tentang Serifikasi Guru dalam Jabatan.

Permendikbud 16 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.



LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN







RIWAYAT HIDUP



Nasrun Arsyad. Dilahirkan di Kampung Campagaloe Kelurahan Bonto Jaya Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 25 Juni 1995, dari pasangan Ayahanda H. Arsyad dan Ibunda Hj. Hartina. Peneliti masuk sekolah TK pada tahun 1998 di TK Pertiwi Campagaloe dan tamat pada tahun 2001, tamat SD Inp Campagaloe 1 tahun 2007

tamat SMP Negeri 3 Bissappu tahun 2010, tamat SMA Negeri 1 Bissappu tahun 2013. Pada tahun (2014), peneliti melanjutkan pendidikan pada program Strata 1 (S1) Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2018.